

Sikap Publik terhadap RUU TPKS & Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus

Temuan Survei Nasional:
Updated 5-7 Januari 2022

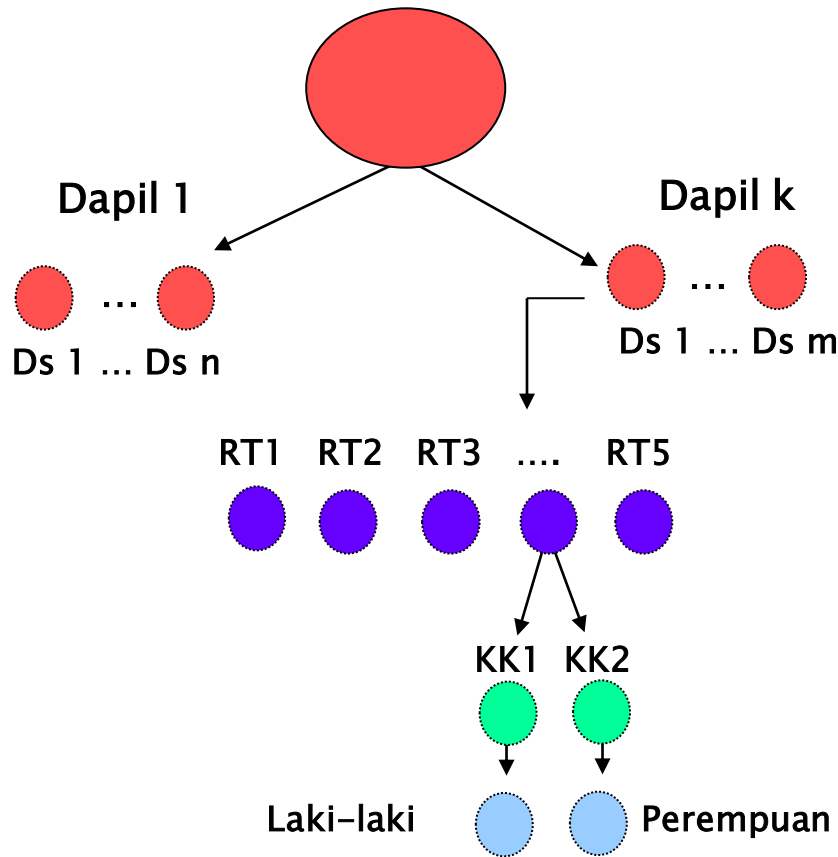
Latar Belakang

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). RUU ini dibuat untuk melindungi warga dari ancaman atau kejahatan kekerasan seksual.
- Sejalan dengan itu, Kementerian Pendidikan, Riset, Kebudayaan, dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri (Permendikbud) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
- Ada yang menginginkan agar RUU TPKS segera disahkan menjadi Undang-Undang, namun ada juga yang tidak atau belum mendukung karena sejumlah pertimbangan. Begitupun dengan Permendikbud, ada pro dan kontra.
- Bagaimana publik pada umumnya menilai RUU TPKS dan Permendikbud tersebut? Seberapa banyak warga yang tahu? Dari yang tahu, seberapa banyak yang mendukung atau menolak?
- Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut SMRC melakukan survei nasional dan diupdate terakhir pada 8–16 Desember 2021 melalui survei tatap muka dan pada 5–7 Januari 2022 melalui survei telepon.

Metodologi Survei Tatap Muka

- Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
- Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 2420 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 2062 atau 85%. Sebanyak 2062 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar $\pm 2,2\%$ pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).
- Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.
- Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
- Waktu wawancara lapangan dalam survei terakhir 8 – 16 Desember 2021.

Flow chart penarikan sampel survei tatap muka



Populasi desa/kelurahan tingkat Nasional

Desa/kelurahan di tingkat Dapil dipilih secara random dengan jumlah proporsional

Di setiap desa/kelurahan dipilih sebanyak 5 RT dengan cara random

Di masing-masing RT/Lingkungan dipilih secara random dua KK

Di KK terpilih dipilih secara random Satu orang yang punya hak pilih laki-laki/perempuan

Metodologi Survei Telepon

- Untuk mengetahui perkembangan isu mutakhir, survei telepon dilakukan dengan memilih sampel secara acak dari database responden survei nasional tatap muka yang telah dilakukan SMRC.
- Sampel survei dengan telepon ini hanya untuk responden yang memiliki telepon/cellphone, sebesar 72% dari populasi nasional.
- Sampel sebanyak 1249 responden dipilih secara acak dengan jumlah proporsional menurut provinsi untuk mewakili pemilih nasional. Margin of error survei diperkirakan $\pm 2.8\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Wawancara dengan responden dilakukan pada 5 – 7 Januari 2022.

Validasi Sampel

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	50.0	50.0
Perempuan	50.0	50.0
DESA-KOTA		
Pedesaan	50.1	50.2
Perkotaan	49.9	49.8
USIA		
<= 20 tahun	10.3	10.3
21-25 tahun	12.4	12.5
26-30 tahun	13.4	13.5
31-35 tahun	12.0	12.0
36-40 tahun	11.6	11.6
41-45 tahun	9.8	9.8
46-50 tahun	8.6	8.6
51-55 tahun	6.6	6.6
56-60 tahun	5.1	5.1
> 60 tahun	10.1	10.1

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
AGAMA		
Islam	87.3	87.3
Protestan/Katolik	9.9	9.8
Lainnya	2.8	3.0
ETNIS		
Jawa	41.0	40.2
Sunda	15.7	15.5
Batak	3.5	3.6
Madura	3.1	3.0
Betawi	2.9	2.9
Bugis	2.6	2.7
Minang	2.6	2.7
Lainnya	28.5	29.4

PROFIL DEMOGRAFI RESPONDEN

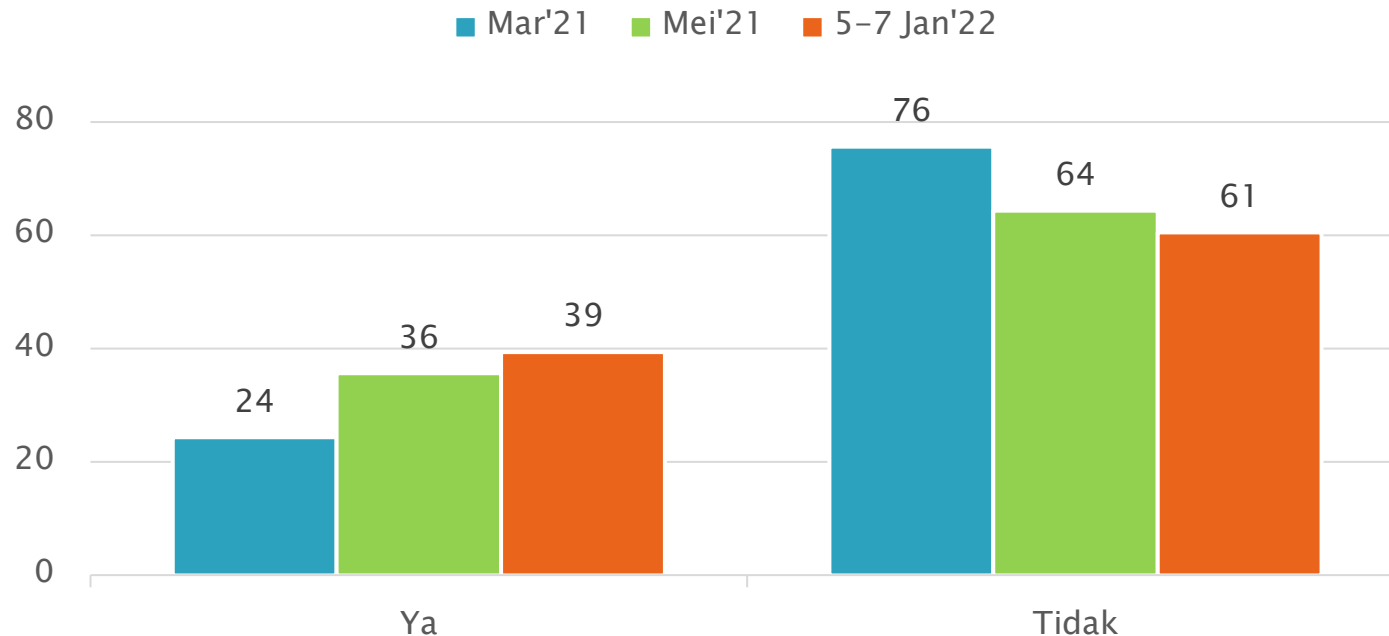
KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
Aceh	1.8	1.8
Sumatera Utara	5.1	5.1
Sumatera Barat	1.9	1.9
Riau	2.0	2.0
Jambi	1.3	1.3
Sumatera Selatan	3.1	3.1
Bengkulu	0.7	0.7
Lampung	3.2	3.2
Bangka Belitung	0.5	0.5
Kepulauan Riau	0.6	0.6
DKI Jakarta	4.1	4.1
Jawa Barat	17.4	17.4
Jawa Tengah	14.6	14.6
DI Yogyakarta	1.4	1.4
Jawa Timur	16.2	16.2
Banten	4.3	4.3
Bali	1.6	1.6

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NTB	1.9	1.9
NTT	1.8	1.8
Kalimantan Barat	1.9	1.9
Kalimantan Tengah	0.9	0.9
Kalimantan Selatan	1.5	1.5
Kalimantan Timur	1.3	1.3
Kalimantan Utara	0.2	0.2
Sulawesi Utara	1.0	1.0
Sulawesi Tengah	1.0	1.0
Sulawesi Selatan	3.2	3.2
Sulawesi Tenggara	0.9	0.9
Gorontalo	0.4	0.4
Sulawesi Barat	0.5	0.5
Maluku	0.7	0.7
Maluku Utara	0.4	0.4
Papua Barat	0.4	0.4
Papua	1.9	1.9

RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Tahu atau pernah dengar RUU TPKS?

Apakah Bapak/Ibu tahu atau pernah dengar berita tentang penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)? ... (%)

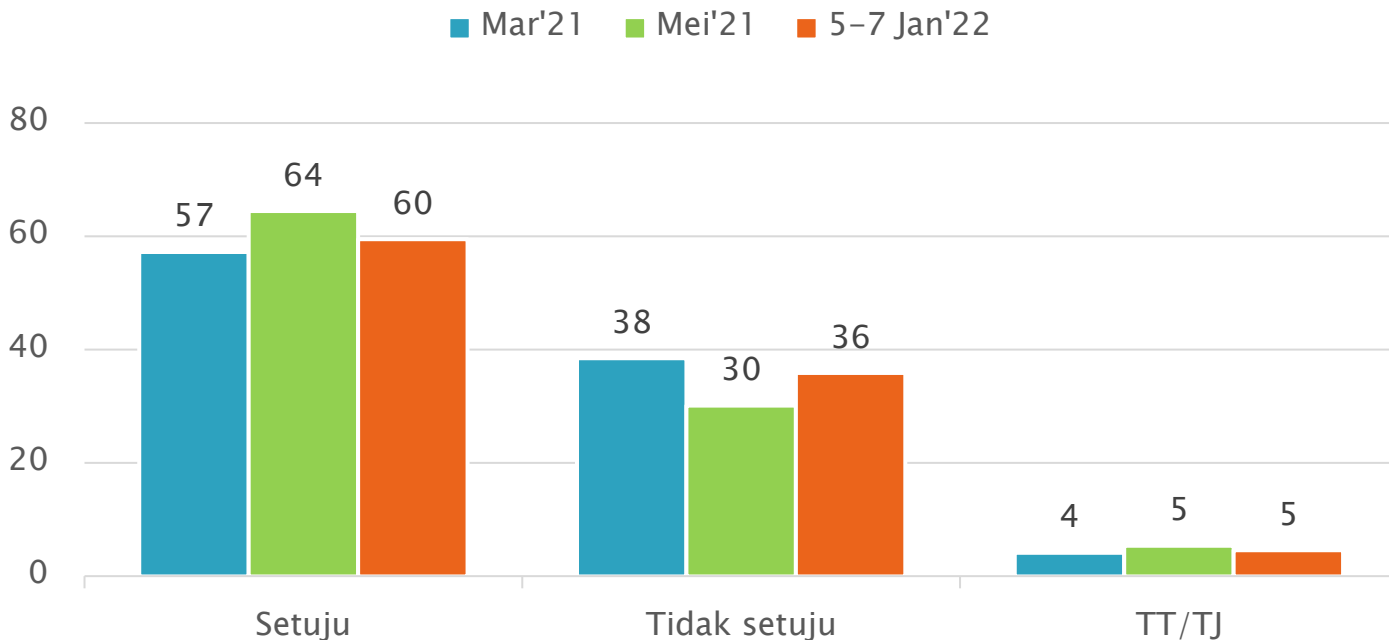


Dalam survei terakhir 5-7 Januari 2022, ada 39% warga yang tahu penyusunan RUU TPKS. Awareness ini naik dibanding survei Maret 2021, sebanyak 24%.

NOTE: Maret 2021 dan Mei 2021 survei tatap muka, Januari 2022 survei telepon.

...Lanjutan: Jika tahu atau pernah dengar, setuju dengan adanya UU TPKS?

Kalau tahu, apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak dengan adanya Undang-undang tersebut? ... (%)
Base: yang tahu RUU TPKS



Di antara yang tahu atau pernah dengar RUU TPKS, dalam survei terakhir 5-7 Januari 2022 mayoritas warga (60%) setuju dengan adanya UU tersebut. Dukungan yang mayoritas terhadap adanya UU tersebut konsisten sejak Maret 2021.

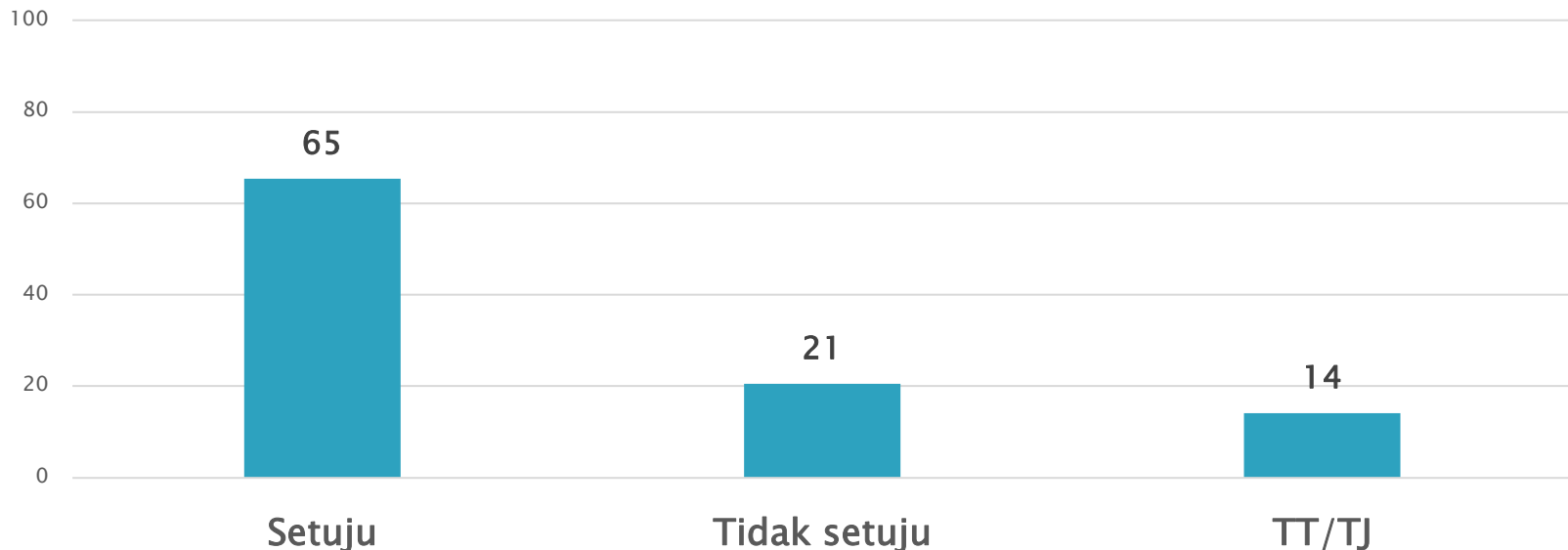
NOTE:

- 1) Maret 2021 dan Mei 2021 survei tatap muka, Januari 2022 survei telepon.
- 2) Jumlah tampak tidak 100% karena pembulatan.

...Lanjutan: Jika Tahu RUU TPKS, Setuju atau Tidak dengan Permintaan Presiden untuk Segera Disahkan

Di bulan Januari 2022 ini, Presiden Jokowi meminta agar RUU TPKS tersebut segera disahkan. Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju dengan permintaan presiden Jokowi tersebut? ... (%)

Base: responden yang tahu RUU TPKS



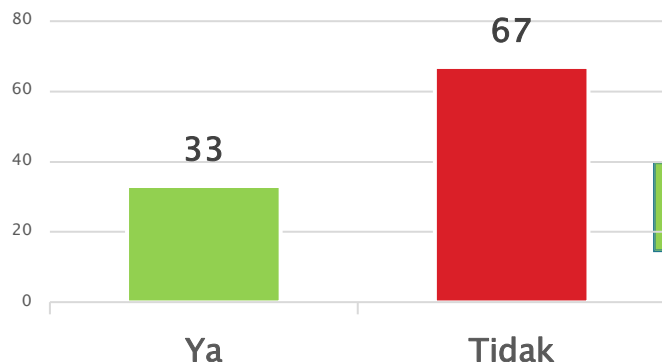
Dari 39% yang tahu RUU TPKS, mayoritas (65%) setuju dengan permintaan presiden Jokowi agar RUU TPKS tersebut segera disahkan.

NOTE: Januari 2022 survei telepon.

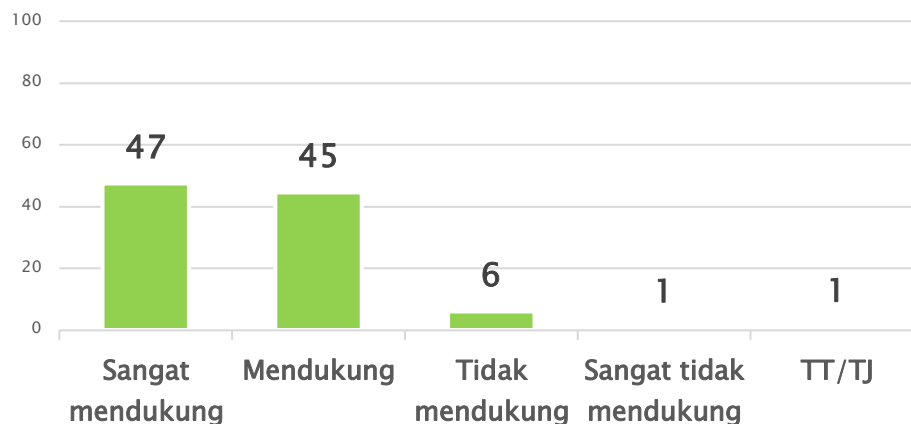
Permendikbud

Permendikbud Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah mendengar tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi? ... (%)



Jika tahu, Apakah Ibu/Bapak sangat mendukung, mendukung, tidak mendukung atau sangat tidak mendukung dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tersebut? ... (%)

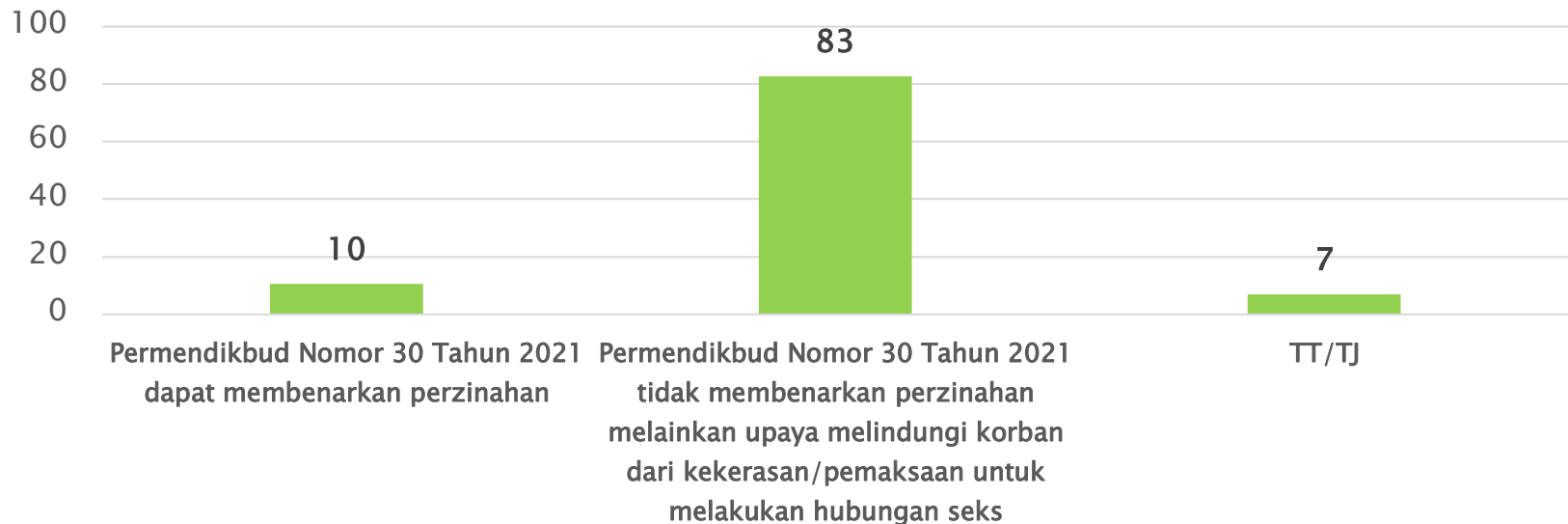


Pada Desember 2021, ada 33% warga yang tahu Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dari yang tahu, mayoritas 92% mendukung/sangat mendukung permendikbud tersebut.

Jika Tahu, Permendikbud Membenarkan Zina atau Upaya Melindungi Korban?

Dalam masyarakat ada dua pendapat tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. **Pendapat pertama** mengatakan permendikbud tersebut dapat membenarkan perzinahan. **Pendapat kedua** mengatakan permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan/pemaksaan untuk melakukan hubungan seks. Pendapat mana yang lebih Ibu/Bapak setuju? ... (%)

Base: responden yang tahu permendikbud No 30



Dari 33% yang tahu permendikbud, mayoritas (83%) warga menilai permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan/pemaksaan untuk melakukan hubungan seks; sementara yang menilai permendikbud dapat membenarkan perzinahan 10%, dan yang tidak tahu/tidak menjawab 7%.

Sikap terhadap RUU TPKS dan Permendikbud menurut Berbagai Kelompok Masyarakat

Sikap terhadap RUU TPKS dan Permendikbud menurut Massa Pemilih Partai

	Base	RUU TPKS					PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS									
		TAHU RUU TPKS?		JIKA TAHU, SETUJU ADANYA UU TPKS?			TAHU PERMENDIKBUD PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS?		JIKA TAHU, MENDUKUNG PERMENDIKBUD TERSEBUT?			PERMENDIKBUD BISA MEMBENARKAN PERZINAHAN? (BASE: YANG TAHU PERMENDIKBUD)				
		Ya	Tidak	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Ya	Tidak	Mendukung/sangat mendukung	Tidak/sangat tidak mendukung	TT/TJ	Permendikbud bisa membenarkan perzinahan	Permendikbud tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban kekerasan seksual	TT/TJ		
MASSA PEMILIH PARTAI																
PKB	8.4	28	72		84	16	0	25	75		98	2	0	10	82	8
Gerindra	10.8	38	62		71	27	2	38	62		92	8	0	11	88	2
PDIP	25.2	38	62		71	24	5	33	67		94	5	1	10	82	8
Golkar	11.2	34	66		54	33	13	33	67		92	6	2	3	85	12
Nasdem	3.4	38	62		73	11	16	34	66		98	2	0	2	98	0
PKS	5.1	38	62		37	63	0	49	51		78	22	0	25	74	1
PPP	2.7	30	70		51	49	0	42	58		97	0	3	5	84	12
PAN	1.8	26	74		100	0	0	29	71		93	7	0	32	68	0
Demokrat	6.2	38	62		37	51	11	35	65		82	16	1	12	83	5
Lainnya	4.4	44	56		42	45	13	39	61		98	2	0	15	79	7
TT/TJ	20.9	34	66		67	30	3	28	72		93	5	2	9	81	10

- Di antara yang tahu, mayoritas (lebih dari 50%) dari massa pemilih PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan PAN setuju dengan adanya UU TPKS; dukungan dari massa pemilih PKS dan Demokrat paling rendah (37%).
- Di antara yang tahu, setiap massa pemilih partai hampir semuanya mendukung Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan mayoritas menilai Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual.

Sikap terhadap RUU TPKS dan Permendikbud menurut Demografi

	Base	RUU TPKS					PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS								
		TAHU RUU TPKS?		JIKA TAHU, SETUJU ADANYA UU TPKS?			TAHU PERMENDIKBUD PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS?		JIKA TAHU, MENDUKUNG PERMENDIKBUD TERSEBUT?			PERMENDIKBUD BISA MEMBENARKAN PERZINAHAN? (BASE: YANG TAHU PERMENDIKBUD)			
		Ya	Tidak	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Ya	Tidak	Mendukung/sangat mendukung	Tidak/sangat tidak mendukung	TT/TJ	Permendikbud bisa membenarkan perzinahan	Permendikbud tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban kekerasan seksual	TT/TJ	
GENDER															
Laki-laki	50.0	36	64	66	29	4	32	68	90	9	1	11	82	7	
Perempuan	50.0	35	65	63	31	6	34	66	94	5	1	10	83	7	
DESA-KOTA															
Pedesaan	50.1	28	72	62	35	3	27	73	91	8	1	12	79	9	
Perkotaan	49.9	43	57	66	27	7	39	61	93	6	1	10	85	5	
UMUR															
<=25 tahun	22.7	32	68	71	26	3	41	59	95	5	1	10	80	11	
26-40 tahun	37.0	38	62	58	33	9	36	64	92	8	1	11	85	4	
41-55 tahun	25.1	37	63	66	28	5	27	73	93	6	1	9	82	8	
>55 tahun	15.2	34	66	68	30	1	24	76	86	11	2	13	84	3	

Di antara yang tahu, mayoritas warga dari setiap kelompok gender, desa-kota, dan usia mendukung adanya UU TPKS dan Permendikbud, dan mayoritas menilai Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual.

Sikap terhadap RUU TPKS dan Permendikbud menurut Demografi

	Base	RUU TPKS						PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS										
		TAHU RUU TPKS?		JIKA TAHU, SETUJU ADANYA UU TPKS?			TAHU PERMENDIKBUD PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS?		JIKA TAHU, MENDUKUNG PERMENDIKBUD TERSEBUT?			PERMENDIKBUD BISA MEMBENARKAN PERZINAHAN? (BASE: YANG TAHU PERMENDIKBUD)						
		Ya	Tidak	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Ya	Tidak	Mendukung/sangat mendukung	Tidak/sangat tidak mendukung	TT/TJ	Permendikbud bisa membenarkan perzinahan	Permendikbud tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban kekerasan seksual	TT/TJ				
PENDIDIKAN																		
<= SD	29.9	25	75		69	27	3		17	83		91	7	3		11	78	11
SLTP	21.5	36	64		66	29	4		31	69		93	6	0		8	85	7
SLTA	37.3	36	64		58	34	8		41	59		92	7	1		10	84	6
PT	11.3	62	38		70	27	3		54	46		92	8	1		13	82	6
PENDAPATAN																		
< 1 juta	36.7	24	76		66	29	5		27	73		94	6	0		14	81	6
1 - < 2 juta	32.4	34	66		69	27	3		31	69		88	9	2		10	82	8
=> 2 juta	30.9	45	55		61	33	7		45	55		93	6	1		9	85	6
AGAMA																		
Islam	87.3	36	64		61	33	5		34	66		92	7	1		11	81	8
Lainnya	12.7	31	69		89	4	7		30	70		96	4	0		4	96	0

Di antara yang tahu, mayoritas warga dari setiap kelompok pendidikan, pendapatan, dan agama mendukung adanya UU TPKS dan Permendikbud, dan mayoritas menilai Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual.

Sikap terhadap RUU TPKS dan Permendikbud menurut Demografi

	Base	RUU TPKS					PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS									
		TAHU RUU TPKS?		JIKA TAHU, SETUJU ADANYA UU TPKS?			TAHU PERMENDIKBUD PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS?		JIKA TAHU, MENDUKUNG PERMENDIKBUD TERSEBUT?			PERMENDIKBUD BISA MEMBENARKAN PERZINAHAN? (BASE: YANG TAHU PERMENDIKBUD)				
		Ya	Tidak	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Ya	Tidak	Mendukung/sangat mendukung	Tidak/sangat tidak mendukung	TT/TJ	Permendikbud bisa membenarkan perzinahan	Permendikbud tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban kekerasan seksual	TT/TJ		
WILAYAH																
SUMATERA	20.4	36	64		66	32	1	36	64		90	8	2	15	73	12
DKI+BANTEN	8.3	51	49		55	29	16	35	65		88	12	0	11	89	0
JABAR	17.4	32	68		53	39	8	30	70		93	6	1	6	87	7
JATENG+DIY	16.1	41	59		72	25	3	41	59		92	7	0	10	82	8
JATIM	16.2	32	68		49	47	4	27	73		94	6	0	11	84	4
LAINNYA	21.6	31	69		79	16	5	30	70		94	5	1	8	86	5

Di antara yang tahu, mayoritas warga dari hampir semua wilayah mendukung adanya UU TPKS dan Permendikbud, dan mayoritas menilai Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- ▶ Dalam survei 5–7 Januari 2022, ada 39% warga yang tahu atau pernah dengar Rancangan Undang–Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).
- ▶ Dari yang tahu, mayoritas (60%) setuju dengan adanya Undang–undang tersebut.
- ▶ Dukungan yang mayoritas terhadap adanya UU tersebut konsisten sejak Maret 2021.

Kesimpulan

- ▶ Sejalan dengan itu, di antara yang tahu RUU TPKS, mayoritas (65%) setuju dengan permintaan presiden Jokowi agar RUU tersebut segera disahkan. Yang tidak setuju 21%, dan yang tidak punya sikap 14%.

Kesimpulan

- ▶ Dalam survei Desember 2021 ada 33% warga yang tahu Permendikbud tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
- ▶ Dari yang tahu, hampir semua (92%) mendukung permendikbud tersebut. Yang tidak mendukung hanya 7%, dan yang tidak punya sikap 1%.

Kesimpulan

- ▶ Di antara yang tahu, mayoritas warga (83%) menilai Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual. Yang menilai permendikbud dapat membenarkan perzinahan 10%, dan yang tidak tahu/tidak menjawab 7%.

Kesimpulan

- ▶ Dukungan kepada RUU TPKS dan Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual cukup merata di setiap kelompok masyarakat.
- ▶ Dari sisi massa pemilih partai, di antara yang tahu, mayoritas (lebih dari 50%) dari massa pemilih PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, NasDem, PPP, dan PAN setuju dengan adanya UU TPKS; dukungan dari massa pemilih PKS dan Demokrat paling rendah (37%).

Kesimpulan

- ▶ Di antara yang tahu, massa setiap pemilih partai hampir semuanya (78–98%) mendukung Permendikbud tersebut, dan mayoritas (74–98%) menilai Permendikbud tersebut tidak membenarkan perzinahan melainkan upaya melindungi korban dari kekerasan seksual.

Kesimpulan

- ▶ Dukungan terhadap RUU TPKS dan Permendikbud juga mayoritas di hampir semua lapisan demografi dan wilayah.
- ▶ Publik pada umumnya menilai positif dan mendukung RUU TPKS serta Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.
- ▶ Ini modal yang penting bagi DPR dan Pemerintah untuk dapat mengesahkan RUU TPKS menjadi UU.

Kesimpulan

- ▶ Dilihat dari opini publik nasional pada umumnya dua kebijakan terkait dengan kekerasan seksual tersebut tidak menimbulkan resistensi. Sebaliknya, kedua kebijakan tersebut mendapatkan dukungan publik.
- ▶ Kalaupun ada opini negatif di tingkat elite dan massa sebagaimana muncul di berbagai media maka opini tersebut tidak mewakili opini publik nasional.
- ▶ Opini negatif yang relatif sedikit itu wajar dalam sebuah masyarakat yang majemuk dan bebas untuk menyatakan pendapat.

Terima Kasih